



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2025 – 2026
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 4
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 3 September 2025
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III)
Acara	: Pembahasan RKA K/L Tahun 2026
Ketua Rapat	: Aria Bima/Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 36 (tiga puluh enam) dari 42 (empat puluh dua) Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI B. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri C. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN D. Sekretaris BNPP E. Sekretaris DKPP

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Sekretaris BNPP, dan Sekretaris DKPP, dengan agenda pembahasan RKA K/L Tahun 2026, hari Rabu, 3 September 2025, dibuka pukul 13.16 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Beberapa hal yang menjadi pokok-pokok pembahasan pada rapat tersebut, sebagai berikut:

1. Kementerian ATR/BPN

- a. Pagu Anggaran TA 2026: Rp9.499.346.965.000 (naik signifikan dibanding tahun sebelumnya).
- b. Program Prioritas:
 - Reforma Agraria dan Redistribusi Tanah.
 - Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
 - Peningkatan kualitas layanan digital pertanahan dan tata ruang.
 - Penyelesaian konflik agraria strategis nasional.
- c. Isu Pembahasan:
 - Efektivitas realisasi program PTSL dan target sertifikasi tanah 2026.
 - Penyelesaian backlog sengketa tanah dan percepatan layanan digital.
 - Kebutuhan tambahan anggaran untuk mendukung target pelayanan publik dan kepastian hukum agraria.

2. Kementerian Dalam Negeri

- a. Pagu Anggaran TA 2026: Rp7.800.000.000.000 (naik 140,43% dari pagu indikatif), termasuk di dalamnya pagu anggaran DKPP sebesar Rp105.160.634.000.
- b. Komposisi Belanja:
 - Operasional Rp1,86 triliun (Pegawai Rp1,09 triliun, Operasional & Pemeliharaan Rp764 miliar).
 - Non-Operasional Rp5,93 triliun (mayoritas untuk prioritas Presiden & Nasional).
- c. Program Utama:
 - Dukungan Manajemen Rp4,57 triliun.
 - Tata Kelola Kependudukan Rp2,06 triliun.
 - Pembinaan Kapasitas Pemda dan Desa Rp852 miliar.
 - Pembinaan Politik & Pemerintahan Umum Rp306 miliar.
- d. Fokus Kegiatan:
 - Mendukung program prioritas Presiden (pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, makan bergizi gratis, pembangunan rumah, koperasi desa, sekolah rakyat, lumbung pangan, cek kesehatan gratis, dsb.).
 - Penguatan SIPD, tata kelola partai politik, penerapan SPM Trantibumlinmas, pembinaan APBD dan BUMD, serta penataan kelembagaan PKK & Posyandu.
- e. Isu Pembahasan:
 - Efektivitas belanja non-operasional yang dominan.
 - Evaluasi pelaksanaan program prioritas nasional dan kontribusi terhadap capaian RKP 2026.

3. BNPP

- a. Pagu Anggaran TA 2026: Rp258.110.875.000 (naik 96,86% dari indikatif Rp131,1 miliar).
- b. Komposisi Belanja:
 - Operasional Rp193,3 miliar (74,9%).
 - Non-Operasional Rp64,7 miliar (25,1%).
 - Per jenis belanja: Pegawai Rp75,8 miliar, Barang Rp175,3 miliar, Modal Rp7 miliar.
- c. Fokus Program:
 - Dukungan Manajemen Rp222,8 miliar.
 - Pengelolaan Batas Negara & Kawasan Perbatasan Rp35,2 miliar.
- d. Prioritas Nasional:
 - Penyelesaian dan penegasan batas negara.
 - Penguatan sistem pertahanan dan keamanan di perbatasan.
 - Peningkatan pelayanan lintas batas & kerja sama antarnegara.
 - Pembangunan sarpras & peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
- e. Isu Pembahasan:
 - Efektivitas lonjakan anggaran hampir 100%.
 - Koordinasi lintas K/L dan daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan.

4. DKPP

- a. Pagu Anggaran TA 2026: Rp105.160.634.000 (naik 17,8% dari 2025 Rp89,27 miliar).
- b. Program Utama:
 - Penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM (Asta Cita 2025–2029).
 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
 - Pencegahan & pemberantasan pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
- b. Isu Pembahasan:
 - Efektivitas penggunaan anggaran dalam pengawasan etik penyelenggara Pemilu/Pilkada.
 - Kesiapan DKPP mendukung tahapan Pemilu & Pilkada 2027.

III. KESIMPULAN RAPAT

Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Sekretaris BNPP, dan Sekretaris DKPP, dengan agenda pembahasan RKA K/L Tahun 2026, memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI menekankan bahwa struktur anggaran Kemendagri, Kementerian ATR/BPN, BNPP, dan DKPP tidak boleh terjebak pada dominasi belanja administratif yang hanya bersifat rutin, seperti perjalanan dinas, rapat seremonial, atau biaya dukungan manajemen yang membebani APBN tanpa memberikan dampak nyata. Anggaran harus diarahkan secara tegas pada program substantif yang langsung menyentuh pelayanan publik, meningkatkan kapasitas aparatur, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan menjawab kebutuhan masyarakat.
2. Komisi II DPR RI menilai praktik alokasi anggaran yang lebih besar untuk kegiatan administratif dibandingkan program substantif adalah bentuk inefisiensi yang harus dihentikan. Oleh karena itu, Komisi II DPR RI meminta Kemendagri, Kementerian ATR/BPN, BNPP, dan DKPP untuk melakukan rasionalisasi dan realokasi sehingga proporsi belanja substantif meningkat signifikan. Dengan demikian, APBN benar-benar berfungsi sebagai instrumen pembangunan, bukan sekadar menjaga rutinitas birokrasi.
3. Komisi II DPR RI menyetujui usulan anggaran yang bersifat prioritas nasional, wajib, dan berdampak langsung pada pelayanan publik, sebagai berikut:
 - a. Kementerian ATR/BPN: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Rp1,16 T, dengan catatan evaluasi dan distribusi yang tepat sasaran dan merata; redistribusi tanah Rp99,4 M; serta penyelesaian sengketa pertanahan Rp79,3 M.
 - b. Kemendagri: Dukcapil Rp2,24 T; BPSDM Rp410 M; Bina Keuda Rp189 M; Itjen Rp135 M; serta IPDN Rp818 M.
 - c. BNPP: Program pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan Rp35,2 M.
4. Komisi II DPR RI mempertimbangkan usulan anggaran yang berpotensi inefisiensi, tumpang tindih, yaitu:
 - a. Kementerian ATR/BPN: Program Peta Zona Nilai Tanah Rp54 M.
 - b. Program kajian dengan biaya besar namun output terbatas, seperti Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Rp9,7 M hanya menghasilkan 6 rekomendasi.
5. Komisi II DPR RI menyetujui dengan catatan/penyesuaian terhadap beberapa usulan anggaran agar lebih efisien, tepat sasaran, dan tidak seremonial, yaitu:
 - a. Kementerian ATR/BPN: Program Akses Reforma Agraria Rp33,5 M dengan syarat rasionalisasi target dan perbaikan skema pendampingan (serapan 2025 rendah, 58,51%).

- b. Kemendagri:
- Setjen Rp2,3 T, termasuk SIPD dan pertumbuhan ekonomi, dengan catatan pemangkasan insentif/hibah.
 - Ditjen Bina Pemdes Rp332 M (smart village, PKK, posyandu, koperasi desa) dan Ditjen Bina Adwil Rp332 M dengan catatan berbasis kebutuhan daerah.
 - Ditjen Bangda Rp295 M untuk program UMKM, sampah, dan stunting dengan catatan dikonsolidasi agar lebih fokus.
 - BSKDN Rp91 M dengan catatan efisiensi pada kegiatan riset/pilot project.
- c. BNPP: Dukungan Manajemen Rp222,8 M (86% dari total Rp258 M), dengan catatan ditekan agar dialihkan ke program substantif.
- d. DKPP: Anggaran Rp105 M (naik 17,8%) dengan catatan pemangkasan belanja operasional non-prioritas.
6. Komisi II DPR RI akan melakukan pembahasan lanjutan dan penetapan RKA K/L Tahun 2026 dengan Menteri/Pimpinan Lembaga dalam Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat mendatang dengan catatan seluruh kesimpulan dan pertanyaan dari Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI diberikan jawaban secara tertulis terlebih dahulu oleh seluruh Mitra Kerja Komisi II DPR RI.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.50 WIB.

JAKARTA, 3 SEPTEMBER 2025
KETUA RAPAT

TTD

ARIA BIMA
A-200